**Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik**
**Volume. 1 Nomor. 4, Tahun 2024**
e-ISSN: 3063-122X; p-ISSN: 3063-1238, Hal 213-221
DOI: https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.374
*Available online at:* https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer

# Dampak Pasca Pemekaran Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus: Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)

**Diah Ayu Sholeha[1], Zhahara Dwi Amanda[2], Diko Ardiansyah[3], Paris Likuwatan[4], Nur Maria Magdalena[5],Yusnike Yusnike[6]**
[1-6]Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Korespondensi penulis: diahayuuee@gmail.com**

***Abstract.*** *This research discusses the impact of post-regional expansion on community welfare, with a case study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province. Regional expansion aims to improve public services and community welfare through decentralization. This research method uses a qualitative approach with library research analysis. The research results show that expansion has succeeded in reducing unemployment rates, increasing access and quality of public services, as well as improving education and health facilities. However, there are challenges such as decreasing agricultural productivity and low community participation. Overall, regional expansion can be an effective tool for improving community welfare, provided there are appropriate policies and active participation from all elements of society.*

***Keyword*****:** *Regional expansion, community welfare, public services, economy, education, health.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas dampak pasca pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan studi kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui desentralisasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran berhasil menurunkan angka pengangguran, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, serta memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun, terdapat tantangan seperti penurunan produktivitas pertanian dan partisipasi masyarakat masih rendah. Secara keseluruhan, pemekaran daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan syarat adanya kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat.

**Kata kunci :** Pemekaran daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, kesehatan.

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berdaulat dengan pemerintahan Republik yang dibentuk pada tahun 1945. Negara ini terkenal karena kepulauan dan sistem politiknya yang demokratis. Ini menunjukkan bahwa masyarakat, sebagai kelompok profesional hukum, memiliki kekuatan yang signifikan untuk memengaruhi seberapa baik pemerintahan berjalan. Hal ini sesuai dengan gagasan awal Abraham Lincoln tentang demokrasi, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dibuat oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat (Canaldhy et al., 2017).

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi yang dibagi menjadi kabupaten-kabupaten dan kota. Provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing memiliki pemerintahan daerah mereka sendiri. Menurut Ayat (2) dan (5), asas otonomi dan tugas pembantuan menentukan cara pemerintahan negara mengatur urusan pemerintahan. Kecuali

*Received: Oktober 14, 2024; Revised: November 16, 2024;Accepted: Desember 04,2024;Published:Desember 07, 2024*

untuk hal-hal yang ditetapkan sebagai urusan nasional oleh undang-undang, pemerintah daerah memiliki banyak otonomi.

Pembangunan daerah ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat lokal. Akibatnya, dengan perluasan wilayah, diharapkan bahwa pemerintah kota akan mendapatkan layanan yang lebih baik karena mereka akan memberikan layanan secara langsung. Pelayanan publik berizin dan tidak berizin yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur yang baik meningkatkan kepuasan masyarakat, mengurangi antrian, dan meningkatkan efisiensi. Ini adalah salah satu dampak pemekaran daerah terhadap kualitas pelayanan publik (Nikasari, 2019).

Pemekaran wilayah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Akibatnya, kesejahteraan rakyat adalah salah satu amanat UUD 1945 dan merupakan bagian penting dari pembangunan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan beberapa indikator kesejahteraan, seperti jumlah penduduk, kesehatan dan gizi, pendidikan, lapangan kerja, tingkat konsumsi, perumahan dan lingkungan hidup, kemiskinan, dan aspek sosial lainnya (Budiati et al., 2021). Tidak semua pemekaran daerah berhasil dalam sekejap, sebaliknya kebijakan desentralisasi berakar dari motif reaktif dan konflik kepentingan, yang semakin menjauh dari orientasi kesejahteraan dan pemerataan kekayaan kepada masyarakat.

Peran pemerintah sangat penting dalam hal kesejahteraan umum. Proses pembangunan manusia dapat berhasil jika ada komitmen pemerintah. Kebijakan DOB memungkinkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan.

Akibatnya, ketika suatu daerah didirikan, penting untuk mempertimbangkan berbagai elemen yang mendukung pembangunannya, terutama sumber daya alam atau perekonomian serta sumber daya manusia yang mengelolanya. Jika salah satu elemen ini tidak diperhatikan, tujuan utama pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat akan terhambat (Canaldhy, 2017). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dengan membandingkan angka harapan hidup, tingkat melek huruf, pencapaian pendidikan, dan tingkat pendidikan. Keberhasilan daerah setelah pemekaran membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti transportasi umum. Selain itu, dengan memperbaiki jalan, sekolah, guru, dan sarana pendidikan lainnya, kualitas hidup masyarakat meningkat (wahidin et al., 2020) dalam (Siregar et al., 2024).

Pemekaran daerah terjadi karena tindakan pemerintah pusat tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat lokal, khususnya masyarakat pedesaan. Selain itu, karena luasnya cakupan dan jumlah penduduk, politik belum diarahkan pada kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan menyerahkan pedoman tersebut kepada pemerintah daerah agar dapat dikembangkan secara komprehensif, adil dan berkelanjutan.

Pemekaran meningkatkan ketersediaan sarana sosial dan ekonomi, seperti jalan raya, pendidikan, dan layanan kesehatan, dibandingkan sebelumnya (Nasria, 2018). Selain itu, sarana pemerintahan menjadi lebih baik. Pemekaran daerah juga mempercepat pembangunan untuk mencapai pemerataan dan mengatasi keterisoliran penduduk di pedalaman (Lariki, 2012).

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang besar bagi setiap daerah untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi yang ada dan sesuai dengan aspirasi dan inisiatif mereka. Dengan kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur urusannya sendiri, daerah tersebut akan berusaha keras untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya saat mengelola dan mengembangkan wilayahnya, sehingga mereka dapat mencapai kemajuan yang lebih besar.

Penulis memilih Kabupaten Musi Rawas Utara, yang merupakan daerah otonomi yang berhasil dalam pemekaran, sebagai subjek studi kasus mereka. Pemerintah pusat telah memberikan izin kepada Musi Rawas Utara untuk berubah menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru) setelah Kabupaten Musi Rawas (Mura) dipecah menjadi Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Ini adalah hasil dari UU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Pemekaran ini diharapkan akan menyelesaikan beberapa masalah saat ini, seperti infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan ketidakmerataan pembangunan, menurut masyarakat setempat.

Dengan adanya pemekaran, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi. Namun, meskipun pemekaran daerah seringkali dijanjikan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan dampak dari aspek ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas maka ditemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana dampak pasca pemekaran daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap kesejahteraan masyarakat?

## 2. KAJIAN TEORITIS

Pemekaran daerah atau wilayah dianggap sebagai cara kreatif untuk mempercepat proses pembangunan dengan meningkatkan kualitas dan membuat layanan lebih mudah diakses bagi masyarakat. Selain itu, pemekaran wilayah adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mempersingkat rentang kendali mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Selain itu, diharapkan bahwa pemekaran wilayah akan mendorong peningkatan kemandirian daerah; ini merupakan salah satu komponen penting dari pelaksanaan otonomi daerah (Tului, 2019).

Pelayanan publik, yang secara umum merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berfungsi sebagai ukuran pencapaian suatu negara dalam pembangunan sosial ekonomi. Dalam menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, menurut (Todaro dan Smith, 2011) dalam (Q'rene et.al., 2023) mencakup tiga aspek yaitu pada aspek pendidikan, pendapatan, dan kesehatan.

Pertama, pendidikan sangat penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam inisiatif pembangunan (Masniad, 2019).

Kedua, dari sudut pandang ekonomi, pendapatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap kenaikan atau perbaikan dalam pendapatan dapat menyebabkan taraf hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, tingkat pendapatan seseorang juga mempengaruhi tingkat kehidupan ekonomi masyarakat (Masniad, 2019).

Ketiga, kesehatan adalah bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan sektor kesehatan adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang mudah, merata, dan terjangkau untuk layanan kesehatan (Tului, 2019).

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library reserch) yang mengguanakn buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dokumen atau literatur review yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, metode penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan, seperti website, jurnal, dan sebagainya. Sumber-sumber tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam menjawab penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Pasca Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Aspek Ekonomi

Dengan luas 600. 865,51 ha, Kabupaten Musi Rawas Utara terletak di bagian paling barat Provinsi Sumatera Selatan. Setelah memisahkan dari Kabupaten Musi Rawas, kabupaten ini terdiri dari tujuh kecamatan, 82 desa, dan 7 kelurahan. Selain memiliki sumber daya tambang seperti minyak bumi dan batubara, kabupaten ini juga memiliki berbagai produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor pertanian merupakan komponen terbesar dari perekonomian Musi Rawas Utara, dan sektor ini juga menjadi lapangan kerja dengan tenaga kerja yang paling banyak. Misi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan usaha kecil dan menengah (UMKM) (Nofiyanti, 2024).

Meskipun pertanian adalah komoditas utama di Kabupaten Musi Rawas Utara, pertanian menghadapi tantangan setelah pemekaran, yaitu penurunan produktivitas. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya arus urbanisasi, rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam pertanian, dan kurangnya upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian pangan melalui penyuluhan (Patunru & Hizkia Respatiadi, 2017). Akibatnya ini menjadi faktor hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kemudian dampak yang paling signifikan pasca pemekaran selanjutnya yaitu pada aspek penurunan jumlah pengangguran. Sebelum pemekaran, masyarakat mengalami kesulitan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan infrastruktur yang memadai. Setelah pemekaran, terdapat peningkatan dalam akses terhadap lapangan kerja, infrastruktur yang memadai serta peluang usaha yang lebih baik yang berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup mereka. Infrastruktur fisik, termasuk infrastruktur komunikasi, transportasi, dan pemerintah, telah dibangun. Selain itu, kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat diterapkan jika ada pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB). Infrastruktur ini

meningkatkan peluang di daerah hasil pemekaran, mendorong pertumbuhan ekonomi (Nofiyanti, 2024).

Dengan kata lain, masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan banyak manfaat dari pemekaran wilayah, terutama dalam hal mengurangi tingkat pengangguran. Ini juga menunjukkan peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat, yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), terutama dalam hal penurunan tingkat pengangguran (Amar & Arkum, 2021).

**Dampak Pasca Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Aspek Pelayanan Publik**

Pasca pemekaran pelayanan publik Kabupaten Musi Rawas Utara mengalami perkembangan yang lebih baik. Hal ini terlihat dari peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Masyarakat melaporkan bahwa mereka lebih mudah mengakses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, yang sebelumnya terhambat oleh jarak dan birokrasi yang kompleks.

Sebelum pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara, penduduk kesulitan mendapatkan layanan karena mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pemekaran wilayah ini meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara, seperti yang ditunjukkan oleh kemudahan mendapatkan layanan publik (Nofiyanti, 2024).

**Dampak Pasca Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Aspek Pendidikan**

Semua Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak memiliki Sekolah Dasar sebelum pemekaran, tetapi sekarang semua Desa memilikinya. Ini menghasilkan lebih banyak sekolah, jarak yang lebih pendek, dan distribusi guru yang lebih adil. Untuk memastikan masa depan yang lebih baik, masyarakat dapat menikmati pendidikan yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2023, terdapat 74 yayasan yang memberikan pendidikan formal dan non-formal, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara. Peningkatan kinerja dan kualitas ini akan menghasilkan pendidikan yang lebih baik (Giantoro et al., 2019).

Setelah pemekaran, siswa atau anak-anak mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, seperti akses yang lebih mudah ke buku sekolah, buku paket, dan LKS. Ini adalah hasil dari pemerataan fasilitas pendidikan yang terjadi karena pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) (Novita, 2020).

Tingkat pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Utara telah meningkat, tetapi masyarakat masih kurang terlibat dalam kegiatan seperti komite sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang

Komite Sekolah, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan komunitas sekolah yang peduli dengan pendidikan. Komite sekolah bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi. Pendidikan yang baik sejatinya adalah pendidikan yang melibatkan semua aspek masyarakat, jadi penyelenggara sekolah yang bertanggung jawab atas hal tersebut (Normina, 2016).

**Dampak Pasca Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Aspek Kesehatan**

Dalam hal kesehatan, masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara merasakan peningkatan yang paling mencolok akibat pemekaran wilayah. Yang paling mencolok adalah peningkatan aksesibilitas biaya pengobatan, yang berarti orang dapat membayar untuk perawatan di Rumah Sakit, Puskesmas, atau Puskesdes. Dalam upaya meratakan pembangunan pasca pemekaran di sektor kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan menjadi prioritas utama, sehingga menurunkan biaya pengobatan bagi masyarakat umum (Rorong, 2018).

Sebelum pemekaran, setiap desa di Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki satu unit Puskesmas Pembantu. Namun, dengan pemekaran, daerah tersebut memiliki lebih banyak fasilitas kesehatan dengan munculnya posyandu dan Rumah Sakit Umum Daerah. Penggunaan posyandu sebagai sarana kesehatan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, termasuk status sosial ekonomi keluarga, pekerjaan ayah, dan tingkat pendidikan orang tua (Kalsum, 2013). Kebijakan pemekaran dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga, meningkatkan ketersediaan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas pendidikan.

## 5. KESIMPULAN

Dampak pasca pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara, memberikan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari segi ekonomi, pemekaran berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini didukung oleh peningkatan akses terhadap lapangan kerja, infrastruktur yang memadai, serta peluang usaha yang lebih baik. Namun, sektor pertanian sebagai kontributor terbesar ekonomi Musi Rawas Utara mengalami tantangan seperti penurunan produktivitas akibat urbanisasi dan kurangnya minat generasi muda. Sementara itu, pada aspek pelayanan publik, pemekaran memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Pelayanan yang sebelumnya terhambat oleh jarak dan birokrasi yang kompleks, kini menjadi lebih terjangkau.

Kemudian, dalam aspek pendidikan, pemekaran berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah, distribusi guru yang lebih merata, serta perbaikan fasilitas pendidikan. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti komite sekolah masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, pada aspek kesehatan, dampak paling signifikan adalah peningkatan keterjangkauan biaya berobat bagi masyarakat. Selain itu, tersedia lebih banyak fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah dan posyandu setelah pemekaran.

Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan meningkat sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara, yang mencakup peningkatan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun ada beberapa hambatan yang harus diatasi, masyarakat telah merasakan manfaat pemekaran. Secara keseluruhan, penunjukan Musi Rawas Utara sebagai daerah otonom baru (DOB) menunjukkan bahwa pemekaran dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat diperlukan.

## DAFTAR REFERENSI

Amar, H., & Arkum, D. (2021). Perbandingan kinerja pembangunan manusia dan sosial ekonomi pasca pemekaran wilayah. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9*(2), 55–63. https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5938

Budiati, I., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A. I., Anam, C., & Hastuti, A. (2021). Indikator kesejahteraan rakyat. 4–15.

Canaldhy, R. S., Wijaya, B. A., & Hairi, M. I. A. (2017). Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2016. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 2*(1).

Giantoro, H. M., Haryadi, H., & Purnomo, R. (2019). Pengaruh kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah menurut persepsi guru dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMK Negeri di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi, 21*(2).

Kalsum, U., & Jahari, A. B. (2015). The strategy to reduce the prevalence of malnutrition among children under five in Jambi Province. *JMJ, 3*(1), 45–59.

Lariki, O. E. S. (2012). Dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Bangkinang menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal UIN Syarif Kasim Riau*.

Masniadi, R., Kamaruddin, K., & Amalia, S. (2019). Dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi di Desa Gapit Kecamatan Empang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, 7*(1), 37-53.

Nasria, S. (2018). Implikasi sosial pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nikasari, R. (2019). Dampak pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik: Studi kasus pemekaran Kecamatan Kranggan Mojokerto. *Unair Press, 78*, 1–12.

Nofiyanti, F. (2024). Dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara. https://repository.unja.ac.id/62976/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/62976/1/tesis%20Fitri%20Nofiyanti.pdf

Normina, N. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Ittihad, 14*(26), 71–85. https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874

Novita, L. (2020). Dampak pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung*.

Patunru, A. A., & Hizkia Respatiadi. (2017). Perlindungan bagi petani: Upaya peningkatan kualitas program perlindungan sosial bagi para pekerja di sektor pertanian di Indonesia.

Q'rene, V. F., Kalangi, J. B., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(10), 73-84.

Rorong, I. (2018). Analisis dampak pemekaran kabupaten-kota terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Studi di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon).

Siregar, T. E. S., Pebrianti, A., Putri, L. U. M., & Winarti, N. (2024). Komparasi daerah sukses dan gagal pasca pemekaran daerah (Studi kasus: Desa Watu Omok dan Papua). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *5*(1), 26-40.

Tului, T. B. (2019). Dampak pemekaran wilayah kabupaten terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. *eJournal Ilmu Pemerintahan, 7*, 1183-1194.

**Sumber Lain:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.